



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI DENGAN
MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM DAN
WAKIL MENTERI PERDAGANGAN**

- Tahun Sidang : 2022/2023
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 34 (Tiga puluh empat)
Jenis Rapat : Raker
Sifat Rapat : Terbuka
Hari dan Tanggal Rapat : Rabu, 21 September 2022
Waktu Rapat : 10.49 s.d.12.33 WIB
Ketua Rapat : Mohamad Hekal, M.B.A.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-Gerindra)
- Acara : Pembahasan penyampaian hasil pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
44 dari 55 orang Anggota, dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**
10 dari 12 orang Anggota
 1. Aria Bima
 2. Adisatrya Suryo Sulisto
 3. Rieke Diah Pitaloka
 4. ST. Ananta Wahana, S.H.
 5. Sonny T. Danaparamita
 6. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
 7. Dr. Evita Nursanty., M.Sc.
 8. Sondang Tiar Debora Tampubolon
 9. DR. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.

10. H. Heru Sudjatmoko

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

8 dari 8 orang Anggota

1. M. Sarmuji., S.E., M.Si.
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
3. Ir. H. Mohamad Idris Laena
4. H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M
5. Doni Akbar, S.E.
6. Trifena M. Tinal., B.Sc
7. Nusron Wahid
8. Budhy Setiawan

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

3 dari 7 orang Anggota

1. Mohamad Hekal., M.B.A.
2. Khilmi
3. Hendrik Lewerissa, S.H., L.L.M.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

6 dari 6 orang Anggota

1. Martin Manurung, S.E., M.A.
2. Drs. H. Nyat Kadir
3. H. Rudi Hartono Bangun., S.E., M.A.P.
4. Zuristyo Firmadata., S.E., M.M.
5. Muhammad Rapsel Ali
6. H. Subardi., S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

3 dari 6 orang Anggota

1. Faisol Riza, S.S.
2. Drs. H. Acep Adang Ruhiat, M.Si.
3. H. Ali Ahmad

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

5 dari 5 orang Anggota

1. DR. Ir. E Herman Khaeron., M.Si.
2. Muslim, SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli

4. Putu Supadma Rudana
5. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom., M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4 dari 4 orang Anggota

1. Amin A.K., M.M.
2. Hj. Nevi Zuairina
3. Rafli
4. Mahfudz Abdurrahman, S. Sos.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

3 dari 5 orang Anggota

1. Jon Erizal, S.E., MBA.
2. Daeng Muhammad., S.E., M.Si.
3. Hj. Intan Fauzi, S.H., LLM.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

2 dari 2 orang Anggota

1. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si
2. Elly Rachmat Yasin

B. UNDANGAN

1. Menteri Investasi/BKPM
(Bahilil Lahadalia, S.E.)
2. Wakil Menteri Perdagangan RI
(Dr. (Jerry Sambuaga)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (MOHAMAD HEKAL, M.B.A./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, dan Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Menteri Investasi/BKPM RI, Saudara Bahilil Lahadalia, dan Kepada Wakil Menteri Perdagangan RI, Saudara doktor, oh udah doktor ya, hebat, Jerry Sambuaga beserta seluruh jajarannya,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, hari ini kita bisa melakukan Rapat Kerja Komisi VI dalam keadaan sehat wal'afiat.



Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi VI DPR RI, rapat kerja hari ini telah dihadiri dan ditandatangani oleh 28 orang, 5 izin mewakili 9 fraksi, sehingga kuorum telah terpenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Maka izinkan saya membuka rapat ini dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum.

Setuju ya?

(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.49 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)

Baik, terima kasih kami ucapkan kepada saudara Menteri Investasi/Kepala BKPM RI, Wakil Menteri Perdagangan RI beserta jajaran, atas kesediaan waktunya untuk menghadiri rapat kerja pada hari ini dan kita sepakati untuk sementara rapat kita selesaikan pada pukul 12.00 WIB ya.

Setuju ya? Oke sip.

(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)

Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami muliakan,

Berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor B16721AG050209 2022, Perihal Penyampaian hasil pembahasan rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023, disampaikan bahwa sesuai hasil pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023, disampaikan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga sebagai bahan penyempurnaan RKAKL di komisi dengan mitra kerjanya. Dengan demikian rincian alokasi anggaran belanja K/L tahun anggaran 2023 yaitu sebagai berikut

1. Pagu anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.094.222.046.000,00, dan
2. Pagu anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.272.241.523.000,00.

Untuk selanjutnya, Komisi VI DPR RI minta kepada Kementerian Investasi dan Kepala BKPM, dan Kementerian Perdagangan RI, agar mengoptimalkan hasil anggaran tersebut dengan menggunakannya sebaik-



baiknya, sesuai dengan keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal 26 dan 30 Agustus 2022 dan keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 8 September 2022. Oleh karena itu, kita hadir rapat hari ini hanya ingin menyampaikan penetapan akhir mungkin terhadap penempat, *eee....*, keputusan akhir. Adakah dari Menteri Investasi atau pun Menteri Perdagangan, ingin menyampaikan tanggapan?

Kami persilakan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pimpinan Komisi VI yang kami hormati,
Bapak/Ibu Anggota DPR Komisi VI yang kami hormati dan kami muliakan,

Karena rapat sudah diputuskan oleh mekanisme internal di DPR terkait dengan pengesahan anggaran, maka kami akan siap menjalankan apa yang telah diputuskan Pimpinan, karena memang kami dapat memahami kondisi yang ada. Namun target 1.400 triliun, ini menjadi target yang sangat besar sekali dalam realisasi investasi di 2024 dengan kondisi yang ada, tapi kalau kami tidak mencapai target, juga tolong dimaklumi, Pimpinan, karena saya belum menemukan teori ekonomi yang target 1.200 triliun, anggaran kami 1,3, kemudian dinaikkan menjadi 1,4, pembiayaannya dikurangi menjadi 1,1. Ya kami sebagai pembantu Presiden harus loyal apa yang sudah diputuskan, tapi kami penting menyampaikan kepada Pimpinan dan Bapak/Ibu semua Anggota DPR, kalau target kami tidak tercapai, kita doakanlah tercapai Insya Allah, tapi kalau tidak tercapai pun, tolong juga dimaklumi. Hanya itu, Pimpinan, kami loyal dan taat yang telah diputuskan oleh negara.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Pak Bahlil.

Tapi rasanya kalau pun ada yang bisa *nih* melakukan tantangan ini, ya saudara Bahlil, Menteri Investasi dan Kepala BKPM RI ini.

Baik Pak Wamen, ada yang ingin disampaikan?

WAMENDAG (DR. JERRY SAMBUAGA):

Makasih Pimpinan, dan

Anggota Komisi VI DPR RI yang terhormat,
Pak Menteri Investasi dan jajaran,



Kami, izinkan mewakili Pak Menteri Perdagangan, karena beliau sedang menjadi *chair* di G-20 acara di Bali. Sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, karena tidak ada perubahan, jadi kami siap untuk melaksanakan apa yang sudah diterapkan dan mohon arahan selanjutnya untuk kita dapat melanjutkan proses yang lebih detail. Itu saja mungkin, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih atas penerimaan anggaran, yang memang kita harus sama-sama sadar situasi ekonomi negara kita pada saat ini. Dan ini mungkin teman-teman juga ada mau memberikan tanggapan, mudah-mudahan singkat-singkat *aja*. Saya lihat ada 5 yang mau memberikan tanggapan.

Kita mulai dari Pak Deddy, silakan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri Investasi dan jajaran yang saya hormati,
Bapak Wakil Menteri Perdagangan yang kami hormati dan jajaran,
Teman-teman Anggota Komisi VI,

Ya kami, apa namanya, juga turut menyesalkan karena anggaran kita usulkan tidak bisa di, dipenuhi, tapi kami percaya bahwa banyak hal yang bisa dilakukan dengan apa yang ada. Dan tentu kami juga memahami bahwa *outcome*-nya, kalau pun tidak seperti yang diharapkan bisa... apa namanya tetap, tapi kami percayalah Pak Bahlil dan Pak Wamen ini punya inovasi-inovasi maupun terobosan untuk memastikan yang direncanakan dengan *outcome*-nya nanti bisa jauh lebih baik.

Nah saya hanya mau menyampaikan singkat saja dua hal, satu, masing-masing ke Menteri Investasi dan Perdagangan, yang tidak terkait anggaran, Pak, tapi sangat penting. Yang pertama Pak, buat Pak Menteri Investasi, saya ingin bertanya, Bapak tugasnya menggenjot investasi, memperbanyak investasi masuk, tetapi ketika investasi bermasalah, siapa yang harus bertanggung jawab? Saya sudah pernah menyampaikan kepada Bapak, kalau tidak salah melalui WA, bahwa ada sebuah perusahaan tambang raksasa di Kalimantan Utara namanya PT KPUC yang sangat besar, ya, dan setiap tahun menghancurkan ekosistem di sana, merugikan rakyat. Dan kemarin beberapa bulan lalu, tanggul raksasanya yang berdiameter 7 kilometer persegi dan tanggul di bawahnya itu jebol, Pak, menghancurkan ekosistem sungai, membunuh ribuan ikan, ya, menghancurkan tambak-



tambak yang ada di sana, merusak perkampungan, ya, ini luar biasa. Dan kami bersyukur karena waktu itu Kementerian ESDM besoknya langsung mengirimkan tim ke lapangan dan terbukti bahwa instalasi pengolahan limbahnya itu jauh di bawah standar, ya. Lalu Gakum dari Kementerian Lingkungan Hidup juga turun, Pak, ya. Hasil dari Kementerian ESDM, dihentikan operasinya, kalau saya tidak salah, hingga tanggulnya, instalasi limbahnya itu memenuhi persyaratan. Dan kami belum mendengar terbuka, diberikan izin untuk membuka kembali, tapi saat ini sudah bekerja seperti biasa, menurut informasi dari lapangan. Dari Gakum kami belum mendengar, Polda kami juga apresiasi karena langsung malamnya turun ke..., hari itu juga turun ke lapangan, dan sekarang dalam proses di tingkat penyidikan, ya. Pertanyaan kami, Pak, ketika terjadi bencana seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Kewenangannya ada di Bapak untuk izin-izin seperti itu, tapi ketika dia berdampak secara luar biasa terhadap ekosistem maupun terhadap masyarakat, siapa yang harus bertanggung jawab? Kita tidak tahu sampai hari ini siapa yang bertanggung jawab. Kalau kami, Pak, harapan kami dari masyarakat, melihat perilaku dari pemilik tambang ini, sudah saatnya dievaluasi, jika perlu dicabut, karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki.

Saya bisa tunjukkan pada Bapak, ini dampak-dampak kehancuran ekologis yang disebabkan oleh perusahaan tambang itu. Air minum, Pak, sampai ber..., satu minggu lebih, masyarakat tidak mendapat pasokan air minum. Dan yang lebih berbahaya, ketika tidak jebol tanggulnya, dia membuang limbah yang belum tentu diolah dan itu dikonsumsi oleh masyarakat sebagai air baku. Ini kan artinya investasi mengorbankan rakyat, Pak, karena sifat daripada polutan yang ditimbulkan perusahaan tambang ini bio akumulatif, Pak. Sehingga apa? dalam jangka panjang, ini akan merusak generasi yang akan ada di sana, terjadi degradasi kesehatan bahkan mungkin mutasi genetik. Kami mohon, karena tahun lalu sebenarnya saya sudah menghadap dan melaporkan kepada Menteri Investa... Menko Marinvest Pak Luhut, ya saya sampaikan waktu itu Pak Luhut dan Pak Seto berjanji akan mengirimkan tim, waktu jebol besar-besaran tahun 2021. Tapi sampai hari ini tidak ada, Pak. Saya kira ini harus menjadi pembelajaran kita, ketika sebuah perusahaan mampu memberikan katakanlah keuntungan bagi dirinya secara luar biasa, memberikan keuntungan bagi pemerintah, pada saat yang sama ada ekosistem yang di rusak dan rakyat yang dirugikan, tapi tidak dihitung sebagai dampak. Padahal kalau neracanya ditimbang, belum tentu pada akhirnya dia memberikan keuntungan.

Kami mohon, Pak, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana mengatasi persoalan ini? Dan kami mohon Kementerian Investasi membentuk tim untuk memastikan perusahaan KPUC ini benar-benar sudah berjalan, beroperasi, menurut regulasi yang ada. Tahun lalu investigasi membuktikan bahwa air sungai itu yang melewati dua kabupaten dan bermuara di laut, itu melewati ambang baku yang diizinkan. Tapi tidak ada, karena pemilik perusahaan ini seolah-olah tidak tersentuh hukum. Kami mohon kepada,



Bapak, Pak Bahlil, mungkin tahu perusahaan siapa yang saya maksud, dan kami minta itu dievaluasi, Pak, tolong dicarikan pengusaha tambang yang mau memperhatikan lingkungan, tidak hanya *profit* dan juga memikirkan bagaimana masyarakat nanti di sana pasca tambang, Pak. Jangan hanya ditinggalkan kolam raksasa yang, yang kemudian menjadi bencana buat kita semua. Jadi mohon, Pak, saya mohon, Pak Bahlil dan Menko Marinvest, untuk melakukan investigasi yang mendalam terhadap masalah ini, agar tidak terulang, karena masyarakat di sana nyaris tidak mendapatkan dampak apa pun.

Yang kedua, perusahaan ini menggunakan jalan negara, jalan milik kabupaten, menjadi jalan *hauling*, yang juga menjadi satu-satunya jalan akses ke masyarakat. Ketika musim kemarau, itu asap apa, debunya sampai orang *enggak* bisa melihat jalan, Pak. Besarnya lubang karena dilewati oleh truk yang besar, menyebabkan sering kali terjadi kecelakaan. Kalau dia musim hujan, Pak, itu seperti bubur, Pak. Jadi apakah investasi seperti ini yang kita inginkan di Republik ini? Seharusnya investasi seperti itu menjadi modal dasar pembangunan kita, bukan justru menghancurkan kehidupan rakyat dan merusak alam tanpa memikirkan konsekuensinya. Saya mohon, Pak Bahlil, Pak Menteri, tolonglah, bentuk tim untuk mengevaluasi ini, karena saya tidak ingin ada orang yang merasa di atas hukum, bisa membeli semuanya, sehingga semua bungkam, Pak.

Saya sudah kirim ke Pak Bahlil bagaimana data-data terkait perusahaan ini dan dugaan kami bahwa dia tidak sesuai dengan aturan yang ada, adalah Kementerian ESDM menyetop operasionalnya, karena memang itu kolam limbahnya dikelola secara kobo, Pak, tidak ada hukum sama sekali. Apakah memang pengusaha di atas hukum? saya tidak tahu, Pak. Tapi ini ujian buat kewibawaan negara menurut saya, dan perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan. Saya mohon perhatiannya yang tulus soal itu, karena saya takut, Pak, nanti eksesnya di lapangan, Pak. Rakyat kecil kalau terus-menerus diinjak, Pak, jangankan rakyat, kucing *aja* menggigit balik, Pak, apalagi kalau sampai rakyat, eksesnya luar biasa, Pak. Mohon agar keberadaan PT KPUC ini dievaluasi dengan benar, Pak. Bukan karena kita menolak investasi, tapi kami berharap investasi itu benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, ya, dan juga kepada pengusahanya maupun kepada negara. Kita tidak menolak, tetangga KPUC itu ada dua perusahaan, tidak pernah menjadi, menjadi masalah bagi masyarakat, hanya yang satu itu, merasa sebagai orang kuat yang tidak bisa disentuh oleh hukum. Saya mohon itu, Pak, karena mungkin hal seperti ini juga terjadi di tempat lain, rakyat tidak punya suara.

Yang kedua untuk Kementerian Perdagangan, mohon perhatiannya sekali lagi, Pak, untuk persoalan perdagangan lintas batas, Pak, di Kalimantan Utara utamanya di daerah Krayan. Sampai hari ini belum jelas bagaimana penyelesaiannya, ketika Pemerintah Kerajaan Malaysia itu meminta agar ada entitas tunggal yang menjadi apa namanya, perantara bagi



perdagangan. Krayan itu, Pak, tidak ada jalan buat ke sana, kecuali melalui udara, Pak, sehingga selama ini sejak sebelum merdeka pun, bahan-bahan pokok itu dibawa melalui perbatasan dari Malaysia, Pak. Nah ini sampai sekarang masih terjadi keributan, sehingga pasokan bahan baku ke, bahan pokok ke daerah Krayan itu belum juga berjalan dengan lancar. Mohon Pak, perhatiannya supaya ini bisa diselesaikan ada kepastian ya, karena PLBN kita di sana belum selesai, masih dalam proses *resizing* dari programnya. Nah saya kira itu, mohon maaf kalau di luar topik kita hari ini, tapi ini menyangkut rakyat di perbatasan yang jauh dari manapun, yang suaranya tidak bisa di dengar di Jakarta.

Saya mohon sekali lagi perhatiannya Pak Wakil Menteri Perdagangan terutama, Pak Bahlil, sahabat saya, mohon didengar jeritan rakyat yang ada di sana.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Anggota DPR yang baik ini.
Baik, Pak Hendrik, silakan Pak.

F-P.GERINDRA (HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak/Ibu Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Sang Bintang Timur, Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil,
Pak Menteri, Pak Wakil Menteri Perdagangan,

Pak Wakil Menteri, karena masih Wakil Menteri, jadi saya *enggak* menyebut bintang, Pak. Meskipun, Bapak dari wilayah timur, Bapak, masih tiga bunga, menurut saya. Nanti saatnya, Bapak, juga akan dapat bintang, tapi Pak Bahlil itu bintang timur kami, Pak.

Ibu/Bapak sekalian yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang pertama saya tentu yakin betul bahwa meskipun pagu anggaran 2023 itu turun 16,1% tetapi dengan komitmen, dengan integritas, kompetensi, dan kapasitas, Pak Menteri Bahlil ini, saya percaya apa yang menjadi target investasi itu akan terealisasi. Kalau pertanyaannya adalah apakah 1.400 triliun target investasi itu realistis? Menurut saya jawabannya adalah, iya realistis. Kita lihat saja trennya, sejak beliau menjadi Menteri Investasi, dari tahun ke tahun target investasi itu naik terus dan ini menjadi justifikasi yang empiris, yang ilmiah, bukan politis, itu yang pertama, Pak.



Yang kedua saya juga mengapresiasi gerak cepat Kementerian Investasi yang melakukan evaluasi terhadap izin-izin usaha pertambangan, termasuk juga melakukan verifikasi dan mencabut izin-izin itu. Saya apresiasi sekali Pak, *two thumbs up* untuk Kementerian Investasi, karena kita tahu betul bahwa kebanyakan juga pemegang-pemegang, pemilik-pemilik izin usaha pertambangan ini, begitu dapat izin, mereka *enggak* bergerak apa-apa di lapangan. Mereka jadikan itu sebagai, ya, agunan di bank, mencari mitra *strategic* untuk mendapat modal dan sebagainya, dan melakukan banyak hal yang belum tentu terkait dengan realisasi investasi mereka atas izin yang telah mereka peroleh. Oleh karena itu, langkah Kementerian Investasi ini patut diapresiasi dan didukung dengan catatan, Pak Menteri, dengan catatan. Bagi mereka yang dicabut izin usaha pertambangannya, kan kementerian juga memberi kesempatan untuk mereka melakukan klarifikasi, dan sudah. Bagi mereka yang telah melakukan klarifikasi dan telah mendapat, katakanlah persetujuan rencana kerja anggaran belanja dari Dirjen Minerba misalnya, kami bermohon kepada Pak Menteri Investasi juga untuk mempertimbangkan mereka. Mengapa ini kami ajukan? Karena ini juga menyangkut asas keadilan dan kesempatan untuk berusaha, sesuai dengan jaminan kontitusi yang mereka miliki. Jadi betul ada penegakan hukum di satu sisi tanpa pandang bulu, tapi di sisi yang lain harus ada juga kearifan dari Kementerian Investasi untuk secara... secara arif mempertimbangkan. Jika memang mereka bisa melakukan klarifikasi dan memberi katakanlah semacam fakta integritas untuk segera merealisasi investasi, saya kira diskresi Kementerian Investasi untuk meninjau ulang SK-SK pencabutan izin yang telah dilakukan secara selektif. Jika itu dilakukan, Pak Menteri, sekali, Pak Menteri, saya memberi apresiasi yang luar biasa, sebagai wakil rakyat yang juga harus menampung aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk juga kalangan pemilik-pemilik izin usaha pertambangan.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Oke kita ke Pak Harris, silakan, Pak Harris.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Menteri Investasi dan Kepala BKPM, dan
Wakil Menteri Perdagangan,



Saya lihat presentasinya Menteri Investasi/Kepala BKPM, persis sama dengan sebelumnya, tetapi hanya ada satu yang menarik, bahwa kalau sebelumnya angka 1.250 triliun target investasi *endak* muncul, kali ini muncul bahwa target investasi 1.250 sampai 1.400 triliun. Kelihatannya sudah mulai agak ragu *nih*, kalau dari kemarin 1.400 pasti tercapai, ternyata penyebabnya adalah bahwa anggarannya diturunkan sebesar 16%. Tapi seperti rekan-rekan yang lain, sang bintang timur, saya yakin 1.400,00 akan tercapai, Pak, jadi jangan dipasang 1.250 sampai 1.400, tapi tetap saja di 1.400.

Yang kedua adalah, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh rekan Hendrik Lewerissa, bahwa saya juga menerima masukan, beberapa izin usaha pertambangan yang dicabut ini harap dilakukan secara sangat selektif, Pak. Kalau memang dia bisa mengklarifikasi, kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen untuk segera melaksanakan investasinya, rasanya ini perlu dipertimbangkan, Pak, agar iklim investasi tetap kondusif, karena target Bapak, bukan 1.250 tetapi 1.400, ini penting.

Dan berikutnya adalah saya mau *nagih* janjinya Menteri Investasi/Kepala BKPM *nih* untuk mendukung masuknya investasi ke dapil saya, Pak. Ya jadi 2023, dari 1.400 triliun, paling tidaklah ada yang sedikit mengalir ke Kabupaten Tegal, Kota Tegal, maupun Kabupaten Brebes. Ini bukan cuma saya yang memperjuangkan, tapi saya yakin Pak Hekal juga akan *nagih* Bapak, Pak, karena kita berasal dari daerah pemilihan yang sama. Kalau saya belum mampu *nagih*, nanti Pimpinan yang *nagih*, Pak Menteri. Rasanya, *kenapa?* Ya rasanya itu saja.

Untuk Pak Wamen, karena kemarin baru ketemu, rasanya tidak ada yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Baik Pak Muslim,

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi VI,
Pak Menteri BKPM,



Wamendag Pak Jerry,

Pertama tentu ke Pak Bahlil *nih*, ini berkaitan dengan target realisasi, memang saya sama kayak sebelumnya *nih*, saya lihat Pak Bahlil biasanya *enggak* ada ragu-ragu *nih*, tapi kali ini *kok* agak ragu sedikit menyangkut target ini. Artinya bahwa saya lihat di sini dari target realisasi tahun 2023, 1.400 triliun berkurang ke 1.250, tapi saya yakin ini bisa tercapailah 1.400 triliun, biarpun kita lihat ada pengurangan 16,1%, Pak Bahlil, ya?

Yang kedua Pak Bahlil, ini ada dua kali RDP saya belum pernah dijawab *nih* urusan saya di Aceh *nih* Pak Bahlil, berkaitan investasi, *kenapa*? Ini harapan masyarakat Aceh, terus-terang ketika gagalnya investasi di Pulau Banyak, Pak Bahlil, sebesar hampir 7 triliun kalau *enggak* salah, oleh perusahaan dari Dubai kalau *enggak* salah ya. Ini perlu kita harapkan, saya lihat dari investasi sekitar 1.400 triliun, harus ada penyebaran *nih*, Pak, Pak Menteri, ya khususnya berkaitan juga dengan misalnya di Sumatera termasuk dapil Pak Harris tadi ya, sehingga keberhasilan, Pak Menteri ini ketika investasi ini dianggap investasi ini ada pemerataan, termasuk di Maluku dan di tempat lain. Terus terang Aceh ini, saya yakin Pak Gubernur juga *udah* ketemu, Pak Bahlil. Saya yakin, saya berharap ini dukungan-dukungan, kemarin kebetulan Pak Bupatiya ketemu kami juga di DPR, mereka berharap *banget*. Mungkin, Pak Bahlil, bisa cerita apa *sih problem* yang utama dan kita dorong seperti apa? Jadi sehingga investasi yang kemarin gagal, kita bisa dorong kembali. Saya yakin bukan hanya di Pulau Banyak, mungkin banyak di tempat-tempat lain ya. Kemudian ya... itu satu mungkin, Pak Bahlil, bisa jawab.

Kemudian berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, sedikit *aja*.

Pak Jerry,

Ini tentu kita tahu betul kenaikan BBM kita ini kan dampak sangat besar kepada kenaikan produk-produk ya, khususnya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Kalau kita lihat di sini, tema RKP di 2022 jelas "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Tentu saya berharap kita tahu betul ini dampak yang sangat dirasakan, kenaikan BBM kepada masyarakat yang khususnya di daerah-daerah pelosok-pelosok ya termasuk harga telur ya kan, harga semua meningkat luar biasa. Tentu kita berharap ini langkah-langkah strategis Kementerian Perdagangan *nih* harus cepat, termasuk operasi pasar dan lain-lainnya. Kita harapkan juga teman-teman Komisi VI bisa terlibat. Kenapa saya katakan demikian? Ini *enggak* terkendali nanti, Pak Jerry, ya dan kita tidak mau terulang kembali seperti kasus minyak goreng ya kan. Tentu kita harapkan dengan kondisi seperti ini, di luar juga masih ada yang demo-demo berkaitan BBM ini, saya yakin Kementerian Perdagangan harus melakukan langkah-langkah strategis menyangkut, khususnya menyangkut *proud* masyarakat ini naik, kenaikan BBM ini. Apalagi kita tahu betul ini dampak kepada pelaku-pelaku UMKM luar biasa *nih*, Pak

Wamen, ya termasuk pedagang kecil, kemudian pengusaha-pengusaha kecil, saya yakin harus ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi terhadap lajunya harga-harga di pasar itu sendiri. Mungkin itu beberapa hal, Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Terima kasih.
Pak Amin.

F-PKS (AMIN AK, M.M.):

Makasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan
Pak Wamendag,
Dengan semua jajaran yang juga saya hormati,

Tentu kita ikut prihatinlah ya, Pak, kenapa ini alokasi... apa namanya... pagu anggarannya tidak sesuai dengan yang diusulkan, tidak sesuai alokasi anggaran. Menurut... sebesar 16,1%, tapi saya yakin memang seharusnya Pak Menteri Investasi ini bisa membuktikan bahwa turunnya anggaran ini nanti tidak berkolerasi atau tidak linier dengan pencapaian target investasi. Ya percuma kan kalau *enggak* bisa, *wong* juga bolak-balik disebut oleh Pak Hendrik, "Bintang Timur", setiap ketemu Pak Hendrik selalu menyebut Bintang timur" ini. *Enggak* bosan-bosan *tuh* Pak Hendrik memotivasi, bintang timur-bintang timur, fakta itu ya kan.

Pada kesempatan ini, Pak, saya tanyakan kaitannya dengan, ini untuk nanti realisasi investasi ya, Pak, ya. Bapak di media menyampaikan terkait dengan investasi yang mangkrak dari 700 sekian triliun, capaian realisasinya, pelaksanaannya sekarang bisa diurai *gitu*, realisasinya bisa sampai 589 triliun ya Pak ya, atau 78%. Dan Pak Bahlil menyatakan, "nanti maksimal". Ini bukan berasa pesimis, Pak, Pak Bahlil sendiri menyatakan maksimal 80%, karena ada faktor-faktor yang tidak bisa dijelaskan dengan rasionalitas, rasionalitas teori ekonomi yang Bapak sebut sebagai variabel atau faktor hantu, katanya begitu. Nah ini saya justru agak bingung, Pak, kenapa ada investasi-investasi mangkrak seperti itu? Mereka bisa menjalankan proses yang sebagian diantaranya adalah, belum selesai, belum tuntas urusan perizinan, dan saya baca *nih* di beberapa ya... apa saya kira lebih tahu sudah tahulah ya. Ada

investasi-investasi yang mereka perizinannya belum beres, ya nilainya ratusan triliun ya, kemudian mangkrak sampai sekian tahun, saya sebagian dari yang... yang mangkrak itu sudah bisa Bapak, selesaikan, tapi diantara yang disebutkan di sini, Bapak menyampaikan ini pesimis untuk bisa diselesaikan. Nah ini bukan kah perizinan itu ranah dari Kementerian Investasi/BKPM? itu pertanyaan saya, Pak, yang pertama.

Kemudian yang kedua, kan selama ini kita juga selalu mendapatkan informasi tentang apa ya... dengan gegap gempita investasi Tesla itu, Pak, di Indonesia. Terakhir bahkan mereka sudah langsung berhubungan dengan perusahaan, ini bahasa media, Pak, ya China di Morowali. Nah kontraknya mungkin sudah ada sekian-sekian, ini bagaimana *sih*, Pak, sebetulnya? Murni ini kami butuh penjelasan ini, ini apakah hanya... apa ya namanya ini... angin segar saja *gitu* ya, bomba, bombastis sedemikian rupa menggembirakan kita *gitu* ya atau memang ini benar-benar sangat potensial untuk direalisasikan, kalau tidak, itu kendala-kendalanya apa? Demikian, Pak Bahlil.

Untuk Pak Wamendag, kami tidak menyampaikan pertanyaan, sudah kemarin kita sampaikan kepada Mendag.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Pak Jon, silakan.

F-PAN (Dr. H. JON ERIZAL, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan teman-teman Komisi VI,
Pak Menteri dan Pak Wamen beserta jajaran,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,

Tentunya kita prihatin, Pak Menteri, karena adanya mungkin penundaan kali ya bukan penolakan, kalau pakai bahasa yang halus, tapi saya agak kaget *nih*. Ini kita harus jadikan momentum bersama, Pak Menteri, Pak Wamen juga, ke depan *enggak* boleh lagi seperti ini, karena apa? Kalau kita naik sedikit ke arah makro, kita punya *budget* itu kan judulnya APBN, anggaran penerimaan, baru belanja negara kan? Bukan anggaran anggaran penerimaan negara, bukan terbalik, jadi fokus kepada penerimaan dulu. Nah di komisi yang lain, Komisi XI ada pajak yang sudah mereka tangani, di kita, ada investasi yang, Bapak, tangani *gitu*, ada perdagangan juga yang mitra kita, kemudian ada lagi deviden yang juga kita tangani. Saya agak bingung



kok ditolak ini, ini memang kita di Komisi VI dan Pimpinan nanti harus betul-betul melihat ini sebagai momentum ke depan, ini *enggak* boleh terjadi. Kita bisa panggil Pak Menteri BKPM, berapa target investasi yang mau masuk dan *your* perlu apa, kan *gitu*. Kita kan perlu melihat *cost and banefit*, *cost* apa yang dikeluarkan, *benefit* apa yang dihasilkan. Saya beberapa kali menyampaikan ke Menteri Keuangan, bahwa efisiensi itu bukan artinya hemat, *gitu*. Sepanjang *cost* itu menghasilkan *benefit* yang besar, *kenapa enggak?* Katanya mau meningkatkan penerimaan negara, tapi *kok* target yang diusulkan dengan *cost* yang dikeluarkan itu *kok* alasannya, hanya ditolak begitu *aja*, ini *enggak* masuk akal. Jadi ke depan nanti kita di internal nanti, Pimpinan, usulan saya, momentum penolakan ini menjadi basis berpikir kita bersama, sama mitra, untuk kita perjuangkan bersama ke depan. Ada beberapa kementerian lain yang tidak mengurus penerimaan negara, malah ditambah *gitu* kan. Jadi kembali lagi dengan filosofi APBN yang saya bilang tadi, anggaran penerimaan baru belanja, kita bukan anggaran belanja penerimaan negara, *gitu*. Kenapa dibuat kata-kata seperti itu? Karena ini penting soal penerimaan. Nah salah satu point utamanya adalah investasi.

Yang kedua, saya mohon juga, Pak Menteri, yang kaitan dengan investasi itu ada hitungan *net* investasinya yang disampaikan ke kita. *Net* itu artinya yang sudah masuk yang tahun dua... sejak era Pak Menteri lah atau sebelumnya juga, yang mangkrak itu dihitung. Tadinya target misalnya 1 triliun misalnya kan, mereka mangkrak diposisi 30%-nya misalnya, nah ini tolong disampaikan ke kita *net*nya, jadi kita *enggak* berpikir atau masyarakat berpikir ini tumbuh, tumbuh, tumbuh terus, tapi setelah di *net off* ternyata kita *shortage*, begitu. Nah ini tolong disampaikan ke kami juga posisi seperti itu, sehingga kita bisa sama-sama mencarikan solusi dan nanti dukungan apa yang diperlukan oleh Pak Menteri untuk menangani hal-hal seperti ini, tentu secara politis kita akan berkomitmen untuk dukung. Saya rasa demikian, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.
Ini daftar sudah habis. Bu Sondang, silakan.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Ada sedikit-sedikit, Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar, Bu Sondang dulu.

F-PDIP (SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON, S.T.):



Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Menteri Investasi, Pak Bahlil, dan juga Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Jerry, Beserta juga dengan rekan-rekan Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Kalau membaca dan melihat tadi pemaparan yang disampaikan, kita bisa melihat bahwa rapor BKPM yang berubah menjadi Kementerian Investasi sejak dijabat oleh Pak Menteri Bahlil, itu luar biasa sebenarnya kalau kita lihat, karena dari tahun ke tahun itu realisasi, kalau kita lihat dari sini di laporannya adalah ini semakin meningkat begitu, Pak. Nah tentu ini tidak lepas dari memang potensi yang dimiliki oleh negara kita, Indonesia, bagaimana dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan juga kondisi makro dari Indonesia saat ini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu katalisator peningkatan dari investasi tersebut. Nah saya hanya mau menyoroti daripada bagaimana penanaman modal berkualitas yang dari tadi juga teman-teman sudah sampaikan, bahwa investasi yang sampai di Indonesia itu harus benar-benar adalah investasi yang berkualitas, tidak hanya jumlahnya banyak, tetapi tidak menimbulkan efek domino yang cukup baik di Indonesia. Nah kalau kalian melihat tadi dari 2020, 2021, sampai 2022 hanya sebesar 48,3% realisasi investasi yang berkualitas itu yang ada di luar Jawa. Mungkin saya mau bertanya kepada Pak Menteri beserta dengan jajarannya, apa upaya-upaya yang dilakukan agar penanaman atau investasi yang berkualitas ini bisa digenjut di anggaran 2023? Karena mungkin ini menjadi salah satu indikator kenapa anggaran di tahun 2023 ini bisa menurun 16,1. Ternyata investasi yang berkualitas hanya sebesar 48, tidak lebih dari 50%. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri oleh Kementerian Investasi agar bisa meningkatkan daripada investasi yang berkualitas. Itu saja mungkin dari saya untuk BKPM, yang lainnya sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain.

Untuk Kementerian Perdagangan,

Pak Wamen,

Mungkin Pak Menterinya *enggak* hadir di sini, tetapi lagi-lagi saya mau mengingatkan bahwa pasca Covid-19, semua orang termasuk di Indonesia juga ini mulai lagi aktifitas ekonomi dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana pengaruh global itu sangat berpengaruh sekali dengan aktifitas ekonomi di dalam negeri. Saya mau mengingatkan sekali bagaimana untuk tetap harus hati-hati dalam pengendalian inflasi, apalagi pasca kenaikan harga BBM, ini sangat, pasti akan sangat berpengaruh sekali terhadap inflasi daripada harga-harga barang dan jasa. Nah ini apa upaya daripada Kementerian Perdagangan untuk mengatasi hal ini? Supaya, karena



kalau inflasi juga semakin lama semakin naik, ini akan terjadi... apa namanya, mempengaruhi kondisi di makro dan rapor daripada Indonesia.

Kemudian yang kedua, saya juga mau menyampaikan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, saya harap jangan sampai seperti yang lalu-lalu, bagaimana ada potensi kita harus bisa mendorong daripada produk-produk dalam negeri, apalagi produk-produk strategis, malah akibat daripada mungkin apa namanya, analisis yang kurang komprehensif, analisis yang kurang bijaksana, akhirnya mengeluarkan kebijakan menstop ekspor dan lain sebagainya, dan itu akan sangat berpengaruh sekali kepada ekosistem daripada produk-produk strategis kita. Seperti kalau saya ambil contoh saja kemarin adalah CPO kita. Jangan sampai lagi terjadi kepada komoditi-komoditi yang lainnya, karena di sini adalah apa ya, ini seperti kita lomba lari, *enggak bisa... enggak bisa... apa namanya...* analisis tidak bisa stop di mana, *gitu*. Oleh karenanya benar-benar saya berharap bahwa Kementerian Perdagangan dalam mengambil sebuah kebijakannya benar-benar memperhatikan seluruh ekosistem, tidak hanya satu komoditi saja. tetapi ekosistem ikutannya. Bagaimana industri *backbone*-nya yang di luar daripada komoditi tersebut pasti akan berdampak, itu saja. Untuk anggaran. saya mungkin tidak akan banyak mengkritisi kembali. Itu saja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Oke yang terakhir, Pak Rudi.

F-P.NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Makasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Pak Menteri Investasi,
Pak Wamen,

Pertama saya ingin ke Pak Menteri Pak Bahlil, saya hanya ingin mengingatkan, Pak Bahlil, karena ini sudah berulang-ulang. Kita ini ketiga kali ya, Pak, ya, atau keempat kali membahas postur anggaran tahun 2023, *gitu*. Jadi di sini kan pagu definitif, Bapak, ini berkurang 16%, Pak, dibanding 2022. Artinya ini saya *enggak* tahu apakah kurang promosi, Bapak, di Badan



Anggaran atau di Menteri Keuangan atau kurang apa ini, Pak? *Kenapa* diturunkan? Kan pernah saya bilang, harusnya promosi ini ya agresif *gitu* Pak, tapi jangan dilupakan yang membuat anggaran itu, Pak, Pak Bahlil. Jadi saya berharap juga *ingatkan* lagi Pak Bahlil, agar postur anggaran ini yang kita sudah berulang-ulang, jangan juga alokasinya untuk yang kemarin kita sebutkan itu dirubah-rubah, Pak Sekjen, *gitu*. Karena ini sudah kita ingatkan berulang-ulang agar ya alokasinya tetap itu yang intinya, Pak Bahlil.

Dan yang berikut, Pak Wamen. Ini, Pak, kami disini kan punya Wamen, Pak, di Komisi VI Pak Nasim, Wamen kami, Pak, tapi *enggak* ada dia. Kami di komisi ini punya Menteri... Menterinya belum kami tunjuk, Pak, Wamennya tapi sudah, Pak Nasim Khan namanya. Nanti dia akan menghubungi Pak Jerry untuk mensinkronkan anggaran ini. Jadi saya pikir, Pak, Pak Jerry, ini juga sudah dibahas berulang-ulang, saya pikir sudah paham Pak Sekjen, Bapak. Itu saja saya pikir.

Terima kasih, saya kembalikan ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Silakan, Pak Menteri Investasi, ada yang mau ditanggapi?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang saya hormati,

Karena waktu kita masih cukup lama, izinkan saya untuk mencoba untuk menjawab satu-satu, sekalipun nanti saya akan *barengi* dengan jawaban tertulis, karena dari beberapa pertanyaan tadi itu adalah rasa ketidakadilan pada rapat-rapat sebelumnya karena sebagian saya jawab, sebagian tertulis. Termasuk dari saudara saya sahabat saya seperjuangan, Pak Muslimin, karena ini menyangkut, karena wilayah yang bergejolak itu dalam sejarah yang terjadi diakhir-akhir ini cuma dua, Aceh dan Papua, dan dua-duanya mendapat otonomi khusus sebagai jalan tengah. Jadi jangan sampai dibilang bahwa Papua jadi Menteri Investasi, terus *enggak* memikirkan Aceh, padahal nasibnya sama, itu. Saya semakin berat ini bintangnya. Saya kalau Pak Hendrik ini kasih kita bintang ini, semakin berat mikulnya.

Bapak Anggota Dewan yang, Bapak/Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Pertama dari sahabat saya, Pak Deddy. Saya *udah* membaca materi yang Pak Deddy kirim ke saya, foto-foto pun sudah saya melihat, dan kalau kondisi lapangan dengan fotonya sama, sebagai mantan pengusaha, saya mengatakan suatu yang tidak adil. Selama ~~lama~~ foto dan lapangannya sama.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Itu bisa diverifikasi, Pak, makanya saya cenderung menyebutnya kejahatan lingkungan, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Karena itu, saya kemarin, begitu saya komunikasi sama Pak Deddy, saya mohon maaf dalam forum yang terhormat ini, Pak Deddy, harusnya saya sendiri yang memimpin tim ke sana, tapi karena ada kunjungan saya ke beberapa negara, terakhir saya kemarin ke ASEAN di Kamboja untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam pertemuan Forum Menteri tingkat Ekonomi di Kamboja. Cukup membuat hati saya gelisah dengan kondisi, sebagai anak yang dibesarkan dari kampung, sebagai anak yang pernah berproses wilayahnya ditambang oleh orang, bahkan hutan diambil, ini menjadi sebuah kewajiban moralitas saya di luar dari jabatan yang hari ini diberikan amanah kepada kami. Oleh karena itu saya berjanji dalam forum ini, saya akan membawa ini dalam satgas dan saya akan sendiri memimpin untuk turun mengecek lokasi. Jadi tadi saya sudah bisik, nanti saya akan bikin tim, melibatkan satgas nanti dari pihak kepolisian, karena wakil ketua satgas itu Wakapolri, dari wakil jaksa agung, kemudian dari KLHK dari dirjenjnya, sama ESDM-nya. Saya akan turun, Pak Deddy, setelah, setelah, paling lambat setelah G20, karena habis ini kami ke Bali, paling lambat sebelum, sebelum Oktober berakhir, saya sudah ke sana. Dan oleh karena itu juga, saya minta dengan hormat agar, Pak Deddy, bisa ikut bersama-sama kami dalam tim itu biar lebih obyektif, transparan, dan dapat kita pertanggungjawabkan demi rasa keadilan bagi rakyat di Kaltara dan kehadiran pemerintah untuk masyarakat.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak.

Saya menyampaikan terima kasih atas respon yang sangat luar biasa dari Bapak Menteri Investasi, karena terus terang, Pak, kalau tadi jawaban itu tidak ada, Pak, ratusan orang dari masyarakat setempat akan datang dan berkemah di depan Istana Presiden untuk menuntut keadilan. Jadi jawaban, Bapak, ini mungkin bisa menenangkan orang-orang di lapangan.

Terima kasih.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya, Pak, saya akan datang sendiri karena sebagai mantan pengusaha tahulah, kelakuan pengusaha mana yang gerakan tambahan dan tidak, kita sama-sama tahu.



Untuk senior saya, Pak Hendrik, ini dari kampung ibu saya. Saya mengucapkan terima kasih, karena mungkin menyangkut dengan anggaran berkurang 16% ini, mungkin sejalan dengan *history*, dalam *history* perjuangan, saya mungkin. Karena kita ini kan berangkat dari perjuangan, bukan karena ada semua fasilitas, diawali dengan ketidakadaan. Mungkin ini juga *challenge* bagi kami dan yakinlah kami tidak mungkin akan cengeng untuk menghadapi ini semuanya. Kita akan menjalankan tugas negara dengan baik, sesuai dengan kemampuan kita, yang penting maksimal. Khusus menyangkut dengan pencabutan izin, izin saya melaporkan bahwa ini kali ketiga saya menjelaskan tentang izin IUP yang dicabut sebesar 2.078 IUP. IUP ini berdasarkan Keppres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penataan Perizinan Berusaha, dimana satgas itu terdiri dari Kementerian Investasi, Menteri ESDM, Menteri ATR, dan Menteri Kehutanan. Dalam Keppres itu juga memberikan mandat kepada Menteri Investasi sebagai Ketua Satgas. Tugasnya salah satu diantaranya adalah melakukan penataan perizinan, termasuk hutan. Kajian-kajian teknis tentang IUP 2.078 IUP itu adalah kajian dari menteri teknis.

Kemudian di dalam Keppres itu dijelaskan bahwa satgas merekomendasikan kajian tersebut untuk dilakukan pencabutan yang dilakukan oleh Menteri Investasi. Jadi bahan bakunya semua dari menteri teknis, termasuk pencabutan konsesi-konsesi hutan yang sudah diumumkan oleh Menteri Kehutanan. Nah terkait dengan itu, kami dalam beberapa kali saya katakan bahwa saya sebagai mantan pengusaha, tidak mungkin zalim sama pengusaha, tetapi juga jangan pengusaha membuat gerakan tambahan yang seolah-olah semuanya benar, 2.078 IUP kami sudah cabut. Sudah barang tentu untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketidaksewenang-wenangan pemerintah, tapi juga bukan berarti pengusaha mengatur pemerintah, karena hakikatnya pengusaha itu tidak boleh mengatur pemerintah, pemerintah yang mengatur pengusaha, tetapi dalam konteks yang berimbang. Pemerintah juga sekali lagi, tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Untuk memenuhi rasa keadilan itu, setelah pencabutan kita lakukan, kita berikan ruang bagi perusahaan-perusahaan IUP yang merasa tidak pantas untuk izinnya dicabut, maka ruangnya adalah keberatan.

Keberatan itu diajukan kepada satgas dan satgas itu terdiri dari Kementerian Teknis dan Kementerian Investasi untuk melakukan penilaian secara obyektif. Saya katakan dalam forum yang terhormat ini, tidak ada satu orang pun yang dapat mengintervensi urusan satgas. Jadi kalau ada yang bilang bahwa nanti pakai si A, si B, si C, nanti begini, *begono, begono*, jangan dipercaya, itu *hoax*, dan bila perlu orang tersebut langsung dilaporkan kepada aparat penegak hukum, karena kami di satgas sangat transparan dan sangat profesional dalam menjalankan hal itu.

Nah terkait dengan persoalan bagaimana mewujudkan apa yang menjadi harapan dari teman-teman pengusaha yang IUP-nya dianggap tidak bersalah kemudian dicabut, Pak Hendrik, kami di tahap pertama, dalam



verifikasi, kami sudah memulihkan 80 izin, 83 izin? 83 izin yang kita sudah pulihkan di pertama. Tahap kedua kita juga lagi, sedang melakukan verifikasi dan IUP-IUP itu kita tidak pernah kenal siapa punya dan siapa orangnya, dan apa, kita tidak mengenal, dan kita kasih, kita kembalikan hak-hak mereka. Nah kalau katakanlah apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi, bahwa ada sebagian konsituen atau masyarakat yang mengajukan, silakan aja melakukan keberatan. Nanti di situ kita akan uji kebenarannya dan kalau memang dia benar, kita kembalikan, *enggak* boleh kita tahan. Karena saya, saya juga tidak mau suatu saat saya jadi pengusaha lagi, kemudian pemerintah berlaku tidak adil bagi saya. Saya tidak mau hukum karma terjadi pada diri saya dalam konteks usaha.

Yang kedua menyangkut dengan... oh investasi mangkrak ya, Pak Hendrik, ya? Investasi mangkrak 708 triliun, oh berarti saya kelewat, Pak Amin, mohon maaf, Pak Amin. Pak Harris senior saya, 1.250 begitu anggarannya, apa, awalnya gencar di 1.400, sekarang *kok* mulai turun 1.250 sampai ke 1.400. Memang biasanya dalam teori ekonomi yang saya belajar begitu, Pak Harris. Terkecuali ada teori ekonomi baru, begitu. Jadi kalau regresi itu kan biasanya ada variabel-variabel penyeimbang dan variabel yang tidak bisa digugat ketika asumsi lain tidak bisa kita buktikan, begitu. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya mulai mundur dari komitmen itu, tapi saya cuma menjelaskan kerangka teorinya saja. Harapan kita untuk maksimal itu bisa terwujud, karena teori ini dulu waktu saya masih jadi aktivis seperjuangan dengan Pak Ketua, Pak Sarmuji, paling ahli sekali dalam membangun asumsi-asumsi teori ekonomi waktu itu, karena kuliahnya bagus, saya kuliahnya agak sedikit bolos-bolos, jadi saya hanya memakai sebagian ilmunya Pak Sarmuji untuk membuat perencanaan. Tapi yakinlah bahwa kita selalu berpikir yang maksimal, itu, yang maksimal, Insya Allah 1.400 akan kita jaga.

Menyangkut dengan... investasi yang berkualitas, khususnya di dapil Pak Harris, saya habis ini saya akan bicara sama Pak Imam, sama Deputi Promosi saya untuk kita dorong ke Brebes sama Tegal. Memang saya ada punya dosa sedikit tentang Brebes. Saya ungkapkan saja, awalnya itu sebenarnya kawasan industri itu yang di Batang itu di Brebes, tapi karena kondisi faktual di lapangannya tidak memungkinkan, maka kemudian kita geser di Batang. Dan untuk memenuhi rasa keadilan, Pak Ketua, sama Pak Harris, nanti kita kesanalah cek, Pak Imam, cek apa yang bisa kita ke sana.

F-PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Makasih, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA. S.E.):

Ya.



Kemudian, Pak Muslim, investasi Aceh, itu investasi Aceh memang dari Uni Emirat Arab untuk membangun kawasan pariwisata halal. Yang diminta kemarin itu adalah kawasan itu menjadi satu kawasan zona ekonomi khusus untuk pariwisata. Beberapa insentif-insentif diminta termasuk di dalamnya ada *tax holiday*, penghapusan pajak PPN terhadap material yang akan masuk. Saya sendiri sudah dua kali ke Aceh untuk melakukan proses ini di pemerintahan sebelumnya, di pemerintahan gubernur sebelumnya. Memang ada berbagai macam permintaan-permintaan dari investor dari Uni Emirat Arab yang memang harus kita wujudkan bersama. Tidak hanya di pemerintahan prov... eh pusat, tapi juga di pemerintahan provinsi dan kabupaten. Saya tidak mungkin menjelaskan detailnya, tapi saya punya keyakinan, Pak Muslim, secara kata batin mengerti betul apa yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita buka masalahnya di sini, nanti orang Papua membuka masalah orang Aceh kan *enggak* enak, Pak Muslim. Tetapi, Pak Muslim paling mengerti, keinginan saya bahwa ini bisa kita wujudkan. Sebagai sesama mantan aktivis dan sebagai, Pak Muslim, sebagai tokoh dari Aceh, pasti mempunyai keinginan besar untuk meninggalkan *legacy* yang monumental dalam rangka pengembangan ekonomi di Aceh. Tapi ini belum berakhir, Pak Muslim. Kemarin *tax holiday*-nya kami sudah mencari solusinya, sudah kita bisa kita ada *exit*-nya. Dan Insya Allah, kemarin gubernur sudah datang ke saya juga dan habis G20, Menteri dari Uni Emirat Arab ini akan datang, kami akan undang nanti Pak Muslim, supaya bisa mengikuti langsung, supaya bisa juga mempertanggungjawabkan kepada konsituen di Aceh. Supaya Insya Allah terpilih lagi, kira-kira begitu. Karena, Pak Muslim, sudah beberapa kali saya tidak.., tidak... , tidak menjawab secara gamblang seperti ini, jadi saya mohon maaf. Memang karena takut juga kalau kita berdua ini, kalau bertanya kita yang jawab, nanti dikira kita masih KNPI, saling olah, soalnya kan.

Kemudian senior saya, Pak Amin, menyangkut dengan investasi mangkrak, benar, Pak. Investasi mangkrak ketika kami masuk, Rp708 triliun dan sekarang sudah terealisasi sebesar 58..., 500..., Rp708 triliun, realisasinya 580 M... Rp584 triliun atau sebesar 78,4%. Sisanya kenapa *enggak* bisa jalan? Pak Amin, sebelum saya jelaskan ada tiga persoalan yang paling prinsip, kenapa investasi mangkrak itu? Yang pertama, adalah memang aturan tumpang tindih antara kabupaten/kota/provinsi, di saat sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi *alhamdulillah* itu bisa kita selesaikan. Yang kedua memang terjadi ego sektoral antara kementerian/lembaga, *alhamdulillah* pun itu sudah kita selesaikan. Yang ketiga adalah memang persoalan yang tidak bisa diurai secara teori tapi dapat dirasakan, dalam bahasa saya ini seperti hantu, seperti angin, dapat dirasakan *enggak* bisa dipegang, dan yang bisa mendekati hantu ini hanya orang yang mantan hantu atau *tau* ilmu hantu. *Nah* 100 triliun lebih yang tidak bisa tereksekusi secara mutlak sampai dengan hari ini, itu diakibatkan karena beberapa investornya karena pandemi, dia kekurangan likuiditas. Jadi bukan lagi persoalan izin atau insentif, jadi pertama adalah persoalan likuiditas dari beberapa investor yang meminta untuk diundur, dari 100 triliun lebih itu, yang



kedua adalah persoalan tanah yang memang *enggak* selesai. Si investornya maunya di lokasi A, tapi karena begitu tahu itu lokasi A, maka tanahnya itu dibuang mau-mau kita *aja*. Jadi kita ini kadang-kadang mohon maaf, kita membuat harga tanah ini seperti sudah sama *capex*-nya dengan membangun mesinnya, ini keahlian kita di Republik Indonesia ini. Kadang-kadang saya membuat analogi itu, kita bukan membangun kawasan industri, tapi kita membangun kawasan industri tanah. Jadi produknya belum ada, kita sudah dapat untung duluan dari tanah. Sampai ayam tumbuh gigi pun, kita susah untuk berkompetisi dengan negara lain, di saat negara lain memberikan tanahnya yang harganya terjangkau dengan fasilitas yang memadai. Itu persoalan fundamental lain yang mungkin saya sampaikan, *kenapa* dari 708 triliun itu yang baru tereksekusi sebesar Rp584 triliun.

Kemudian menyangkut dengan Tesla, izinkan saya dengan hormat kepada, Pak Amin, bahwa kami sesama plat kuning diantara kementerian, *enggak* boleh saling mendahului. Kebetulan yang diberikan penugasan tentang Tesla ini adalah Pak Menko saya, Pak Luhut, dan kami diberikan tanggung jawab untuk mengurus Foxcon dari Taiwan. Nah menyangkut Tesla, kekinian sampai di mana, kami belum *ter-update*. Mungkin Pak Menko kami yang akan lebih kompeten, detail, untuk bisa menjelaskan. Nah terkait dengan dugaan apakah benar Tesla sudah melakukan kerja sama membeli material dengan salah satu perusahaan yang ada di Sulawesi? Saya katakan bahwa penjakakan komunikasinya sampai sekarang, benar adanya. Dan itu mereka meminta produknya akan dibeli oleh Tesla. Tapi bahwa Tesla melakukan investasi manufaktur, saya *enggak* bisa menjelaskan di dalam forum yang terhormat ini, jangan sampai saya takut salah, syukur kalau benar. Kalau salah kan saya berdampak sistemik juga. Itu menyangkut dengan Tesla.

Untuk, Pak Jon, saya setuju, Pak, yang saya juga pelajari dulu di semester III, APBN itu Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bukan Anggaran Belanja Pendapatan Negara. Jadi saya setuju dengan pemikiran ini, saya sedikit meng-*highlight*, mohon maaf Bapak/Ibu semua, 80% pendapatan negara kita ini bersumber dari pajak. Kelebihan pendapatannya sekarang terjadi akibat karena harga komoditas, dapat dari AP, pendapatan negara bukan pajak atau sebagian royalti. Kalau kita pakai mundur ke belakang, itu semuanya adalah pajak, yang mana pajak itu paling besar adalah pengusaha, pajak badan perusahaan. Kalau kita menganalogikan satu siklus, pajak itu kan di hilirnya, dia *ngutipnya tuh* di hilir. Berarti kan harus ada hulunya dulu, hulunya itu adalah hulunya adalah investasi, pengusaha masuk. Dalam pemikiran saya, mohon maaf tolong koreksi kalau salah, satu perusahaan yang masuk di Indonesia, itu sama dengan saham negara kurang lebih 30%, PPN, PPH Badan, sekarang PPN-nya 11%, PPH Badan 20%, PPH Pasal 21 karyawan. *Nah* yang saya bingung itu adalah yang dikejar adalah hilirnya, hulunya *enggak* dilihat, akhirnya diperas apa? sapinya itu-itu *aja*. Nah kalau cara pandang kita ini tidak kita luruskan dalam kerangka yang benar berdasarkan teori ekonomi, maka kita akan terjadi distorsi pemikiran, dalam rangka membangun bangsa kita ke depan khususnya tentang



bagaimana menggenjot pendapatan negara kita. Jadi menurut saya, hulunya itu investasinya harus dibuat, nilai tambah hilirisasinya itu di sini. Jadi kalau di sini pupuknya *enggak* dikasih, bagaimana mendapatkan tanaman yang bagus. Ini sedikit kita memberikan pandangan sesuai dengan apa yang tadi Pak Jon, dan saya sangat setuju sekali.

Jadi bila perlu, Komisi VI berbicara tentang bagaimana mendapatkan pendapatan negara sebesar itu. Jadi bukan bagaimana pendapatan negara kemudian dibagi. Kalau dibagi itu dilakukan apabila ada sumbernya. Mohon maaf, ini sekedar saya menyetujui apa yang disampaikan oleh abang saya, Pak Jon, tadi.

Yang kedua menyangkut dengan pencapaian investasi mangkrak, kami akan menyampaikan, tapi realisasi investasi yang kami umumkan itu adalah realisasi *real*, bukan komitmen investasi. Kalau komitmen investasi, kami tidak menyampaikan karena itu sebagian bohong juga, karena itu cuma MoU-MoU *aja*, kan kelakuan kita waktu jadi pengusaha itu. Apalagi kalau aktivis, itu kalau buat surat, jangankan seniornya yang, yang tersenyum, Tuhan pun kalau baca itu surat pasti, pasti menangis mendengar kalau, itu kan kita ini kan kalau di aktivis 1 ju..., 1..., 100 rumus yang bisa dikembangkan. Jadi kami di Kementerian Investasi tidak mencatat komitmen investasi tapi realisasi investasi berdasarkan LKPM.

Kemudian, Ibu Sondang, investasi yang berkualitas.

Bu,

Ibu, baca di halaman 2 kalau tidak salah dari pemaparan saya ya. Saya dari awal takut sekali kalau masuk pemaparan di Komisi VI, karena banyak senior saya yang tahu kelakuan saya dan tahu kelakuan mereka juga, kalau saya. Karena biasanya kalau kita itu hanya kepada Tuhan kita percaya, manusia butuh data. Kadang-kadang *enggak* ada data pun, dibuat datanya sendiri. Ibu tolong lihat di halaman nomor 2, yang, Ibu baca itu adalah rencana kerja Kementerian Investasi pada RPJM. Namun dalam realisasinya, sejak Indonesia merdeka, realisasi investasi di Pulau Jawa, itu jauh lebih besar ketimbang di Jawa sampai dengan kuartal ketiga 2020. Karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, jangan membangun Indonesia Jawasentris, tapi membangun Indonesia harus Indonesia sentris, dari Aceh sampai Papua. Karena itu data kami menunjukkan bahwa realisasi investasi kami sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2021, *alhamdulillah* realisasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar, Bu. Jadi sudah memenuhi apa yang, Ibu, tadi tanyakan tentang syarat kualitas apa, syarat investasi yang berkualitas. Bahkan di 2022 di semester pertama, investasi kita sudah mencapai, di luar Pulau Jawa 52%. Ini bukan karena Menteri Investasinya dari Papua, Bu, bukan, tapi ini dalam rangka keadilan tadi. Jadi mohon maaf, Bu, data yang Ibu baca itu adalah rencana, bukan rencana realisasi yang RPJM tapi realisasi kami yang data yang sudah di *slide* ini, ada, Bu. Tapi terima kasih,



Bu, Ibu telah memberikan masukan kepada kami, supaya kami semangat terus. Jadi investasi di luar Pulau Jawa penyebarannya sudah bagus, Bu. Dulu di Maluku Utara, Bu, siapa yang tahu Maluku Utara, Bu? *Enggak* ada, Bu. Sekarang itu target PMA, salah satu terbesar di wilayah Indonesia itu di Maluku Utara. Di Sulteng dulu, Bu, siapa yang tahu? *Enggak* ada yang tahu. Surplus neraca perdagangan kita dengan China sekarang 1 *billion* US Dollar, itu produknya dari sana. Yang belum itu adalah di kampungnya, Pak Muslim, Aceh itu yang menjadi tanggung jawab saya sekarang. Itu kira-kira.

Kemudian senior saya, Pak Rudi, alokasi anggaran jangan berubah-ubah, siap Bang, siap Pak. Saya tidak akan merubah-ubah alokasi anggaran, lebih khusus untuk anggaran sosialisasi teman-teman dalam rangka membantu Kementerian Investasi untuk meningkatkan realisasi investasi 1.400 triliun. Itu *enggak* boleh dirubah-rubah, karena kalau tidak nanti anggaran kami apa, realisasi kami tidak akan tercapai. Dan sekaligus untuk mengecek beberapa negara yang potensi investasi. Ini dalam rangka membangun sinergitas antara eksekutif dan legislatif. Saya pikir hanya itu, Pimpinan, banyak kali hari ini saya jawab sehingga semoga, Pak Muslim, ini tidak lagi marah-marah saya kalau di luar lagi ngopi.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Pimpinan,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsallam warahmatullahi wabarakatuh

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Pimpinan, sedikit boleh, Pimpinan?

KETUA RAPAT:

Iya silakan, Pak.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.A.P.):

Terima kasih.

Ini karena, bukan, karena ini Pak Menteriya bilang waktunya cukup panjang maka kita, jadi agak berani sekarang bicara pelan, kita mau bicara masalah investasi yang berkualitas, karena teman-teman tadi bicara tentang investasi yang berkualitas. Saya di dapil saya, itu kalau boleh dibilang, investasinya sama sekali tidak berkualitas. Kenapa demikian? Karena segala yang namanya investasi swasta dan pemerintah, itu mengarah selalu ke selatan. Kemarin ada peresmian jalan tol, katanya mulai dibuka apa, peletakan batu pertama jalan tol, itu arahnya juga ke selatan. Kemudian kemarin dapat pinjaman hampir 2 triliun lebih, itu menjadi Pusat Kesenian Bali, di selatan juga. Apa yang terjadi ketika terus-menerus nanti di selatan? Saya mengkhawatirkan orang Bali nantinya yang di selatan akan termarjinalkan, *kenapa? Kenapa* bertumpuk? ini saya selalu ingatkan, saya *refresh* lagi, karena ternyata berjalan terus ini. Jadi sebagai Meninvest yang jago loby dan biasa bicara dengan presiden, saya meminta presiden tadi disebutkan ingin pemerataan, pertumbuhan yang tinggi dengan pemerataan dengan timbul pelaku baru, ditugaskan Meninvest untuk pemeratakan pertumbuhan tersebut, ditugaskan Meninvest untuk melakukan timbul pelaku baru di daerah-daerah sehingga diminta untuk partisipasi dari teman-teman daerah untuk setiap investasi yang ada. Nah kalau di Bali, ini berbeda lagi. Ini di Bali ini semua arahnya ke selatan, bahkan para menteri pun ketika ada anggaran, mereka lebih banyak mengucurkan di selatan, karena gampang nanti untuk meninjau. Kecuali kalau sosialisasi sama, saya sama Pak Imam itu agak jauh saya taruh ke utara untuk sosialisasi, karena saya ingin menyeimbangkan, ada pemasukan di daerah utara dari kucuran BKPM untuk sosialisasi sehingga agak menyeimbangkan sedikit. Persoalan kenapa termarjinalkan? Karena yaitu mereka pertumbuhannya yang tinggi, inflasinya terjadi, tidak bisa diikuti oleh pendapatan daripada teman-teman yang buruh serabutan, PNS Golongan II, kemudian buruh apa... pegawai-pegawai negeri biasa atau pegawai swasta biasa, ini *enggak* bisa mengikuti, yang akhirnya mereka menjual tanahnya dan memang menarik untuk dibeli juga oleh yang di luar-luar Bali, karena harganya cukup menarik, karena apa, juga kenaikannya juga cukup menarik.

Nah oleh karena itu, saya minta dengan kepiawaian dari Pak Menteri, untuk bisa di daerah utara. Ya kalau di daerah Sumatera, kita sampai berdarah-darah minta PMN di sini, BUMN kita berani apa, rugi, tidak sesuai dengan keekonomian membangun tol, *kenapa enggak* di utara, jadi panturanya Bali dibangun juga jalan tol. Bukan mengarah ke selatan. Yang akhirnya bagi kami, kalau saya melihat sebagai kebetulan sekolahnya juga ekonomi, maka ini pertumbuhan ini *enggak* ada manfaatnya, pertumbuhan dengan tidak pemerataan di Bali dan akan menghilangkan justru banyak orang Bali yang akan seperti betawi di Jakarta, banyak tidak dihuni oleh orang Bali.

Nah lihat, saya lihat juga pertumbuhan yang rendah di daerah utara dan timur, itu menyebabkan juga kesempatan kerja yang rendah, kesempatan kerja yang rendah, mereka akhirnya urbanisasi juga ke selatan, mau jadi



preman, mau jadi *security*, mau jadi pembantu semua ke, ke selatan. Yang akhirnya juga adat dan budaya yang melekat pada orang Bali tidak terjaga juga, karena mereka *enggak* sempat lagi melakukan apa, waktu-waktu untuk, upacara adat, kemudian bersosialisasi dengan apa, membangun budaya dan adat yang di Bali, sehingga akhirnya mereka kehilangan juga tentang pertumbuhan daripada adat tersebut. Yang nantinya

KETUA RAPAT:

Baik, Pak, boleh dipersingkat?

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Boleh, ini

KETUA RAPAT:

Pak Wamennya mau *ngejar* pesawat jam 2 ini.

F-PG (GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E., M.AP.):

Daya tarik, saya telepon Pak Irfan untuk agak mundur sedikit ini. Saya 5 menit, saya *udah*. Saya dengan daya... daya tariknya adalah adat dan budayanya, kalau hilang adat budayanya, Bali tidak menarik lagi. Nah oleh karena itu saya juga melihat bahwa sekarang ini karena pertumbuhan semuanya ke selatan, sementara sekarang ini turis nantinya saya meyakini tidak akan nyaman, karena akan mulai macet.

Pak Menteri,

Saya ingin mengingatkan juga bahwa, kemacetan di Bali itu sangat sulit dibenahi, karena ada satu anomali, yaitu kalau kemacetan itu biasanya diselesaikan dengan *public transport* yang baik. Anomalinya di mana? Ketika publik transportnya bagus, maka kendaraan pribadi akan menurun. Nah Pemerintah Bali pendapatannya 74% APBD-nya adalah dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Ini perlu dipecahkan secara nasional, apakah mungkin nanti pajak kendaraan bermewah ditingkatkan atau pajak kendaraan biasa ditingkatkan, untuk menanggulangi menjadi *public transport*. Dan saya rasa semua kota sama halnya, *public transport* tidak bisa terlalu dijalankan karena provinsi, salah satu pendapatannya adalah PKB. Dan saya minta, Pak Menteri, dengan berserta jajarannya nanti, program-program lebih banyak ke selatan, eh lebih banyak ke utara dan ke timur, itu satu, dari kementerian. Karena di selatan ini yang, yang untung yang banyak mendapatkan kemewahan daripada pariwisata itu adalah dari PHR (Pajak Hotel dan Restoran) yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung dan Denpasar, dan Gianyar. Nah oleh karena itu untuk menyeimbangkan, tentu program dari pemerintah pusat maupun provinsi. Nah ini yang saya minta, sehingga



akhirnya nanti kita bisa melakukan apa yang menjadi cita-cita Pak Jokowi yaitu pemerataan, pertumbuhan, pemerataan, dan timbul pelaku baru itu.

Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan tersendiri nanti dalam diskusi-diskusi, apalagi sekarang banyak ke Bali, diskusi-diskusi Pak Menteri dengan teman-teman, dan kalau mungkin dengan Pak Jokowi bahwa tidak ada keseimbangan di Pulau Bali. Dan saya minta juga airport segera juga di utara, sehingga paling cepat untuk bisa menyeimbangkan Bali itu sendiri.

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Iya, baik.

Ini, Pak Ketua mau bicara, saya *enggak* bisa potong kalau yang ini.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Enggak.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Hekal dan Pimpinan, Anggota,
Pak Menteri Investasi, Pak Wamen Perdagangan, dan
seluruh jajaran,

Saya mau melanjutkan sedikit yang Pak Demer, sampaikan. Ini kan, Pak Bahlil ini kan kalau membela orang daerah kan luar biasa, karena merasa bahwa Indonesia itu bukan Jawa kan begitu ya, Pak Menteri, ya? Jadi saya dengar di Bali waktu setelah Covid, ada banyak hotel yang mau dijual, hotel-hotel besar. Menurut saya itu apa, kerugian tapi juga mungkin bentuk investasi yang lain, barangkali yang bisa apa, bisa ditawarkan. Nah kita khawatir kalau hotel-hotel itu lebih banyak masuk justru dimiliki perusahaan-perusahaan luar, asing, sehingga orang-orang Bali sendiri *enggak* punya kesempatan untuk bisa ikut apa, memiliki aset-aset itu. Barangkali ini perlu pemikiran yang agak khusus dari Pak Bahlil ini yang kita kenal cerdas, cekatan *gitu* ya, pasti ada rumus yang paling inilah, paling jitu, bagaimana ini bisa dilindungi tapi juga bisa dijalankan, itu yang pertama.

Yang kedua, mungkin bisa dibuka presentasinya Pak Bahlil di halaman kedua yang, yang bahan ini tapi bahan apa, Rapat Kerja 21 September 2022. Halaman 1 kalau begitu, halaman sebelum itu, sebelum ini, nah ini dia. Ini foto yang saya suka sekali, karena bisa kita tafsirkan agak sangat apa, serius. Bagaimana Pak Bahlil dan Presiden, beserta IBu Iriana. Saya ingin apa, sedikit mengilustrasikan bahwa investasi kita di Indonesia, bukan hanya modal asing. Dan kita tahu bahwa ada cukup banyak orang kaya di Indonesia, Pak Bahlil, dan orang-orang kaya ini kadang-kadang nyimpan



uangnya juga susah, jangankan di dalam negeri, di luar negeri *aja* susah nyimpan uangnya. Nah Undang-Undang Investasi, Undang-Undang Cipta Kerja kita, sebenarnya kan undang-undang yang boleh dibilang menyediakan karpet merah untuk para investor supaya bisa me.. apa, menginvestasikan modal mereka, mempercepat pembangunan di republik ini. Nah saya ingin sedikit mendapat penjelasan, selain investor asing yang tadi Pak Bahlil sampaikan, dari Uni Emirat Arab atau dari tempat-tempat lain, pemodal dalam negeri ini sejauh mana diberikan kesempatan oleh Kementerian Investasi maupun BKPM, terlibat dalam proyek-proyek nasional kita yang strategis. Karena kalau dalam proyek-proyek pada umumnya, saya kira mereka banyak terlibat, tapi proyek-proyek strategis yang ada itu kan ada gambar apa, di belakang Pak Jokowi itu kan bagian dari proyek-proyek strategis. Nah sejauh mana 10 orang terkaya di Indonesia ini, kan semua sahabat Pak Bahlil ini, ya sahabat, ya teman, mungkin keluarga juga, terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional kita, ya, terlibat dalam kesempatan investasi yang diberikan oleh pemerintah. Ini penting, karena nilai dalam negeri dengan nilai modal luar negeri, ini maknanya jauh berbeda secara filosofis. Dan saya kira sebagai aktivis yang sudah lama berkecimpung, yang diinginkan Pak Bahlil, pasti sama dengan yang diinginkan oleh saya, kira-kira begitu ya, itu yang kedua.

Yang terakhir, saya mau kaitkan dengan penggunaan anggaran, sebagai pesan saja bahwa beberapa hari yang lalu, itu Pak Presiden juga sudah mengeluarkan instruksi yang sangat penting untuk pengadaan barang dan jasa. Instruksi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, mengamanatkan pengadaan barang dan jasa, pemerintah wajib menggunakan produk dalam negeri paling sedikit 40%.

Pada kesempatan ini saya kira kita perlu membangun komitmen bersama. Karena dengan payung hukum ini, semestinya tidak ada alasan lagi produk dalam negeri itu disebut lebih mahal dibanding dengan produk asing. Memang bisa lebih mahal, tapi dengan payung hukum ini, saya kira proses pemeriksaan yang dulu-dulu selalu mengacu pada dasar harga termurah setiap pengadaan barang dan jasa, ini bisa apa, diselesaikan dengan payung hukum ini. Makanya saya berharap Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, dan seluruh jajaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, memberikan betul-betul kesempatan yang sudah diinstruksikan oleh presiden ini, dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin nanti pada kesempatan yang akan datang, kita juga ingin mendapatkan penjelasan dalam proses pengadaan barang dan jasa di masing-masing kementerian/lembaga, berapa persen yang sudah diberikan kesempatan untuk produk-produk dalam negeri kita. Saya kira ini yang terakhir, Pak Hekal.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT:



Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik mungkin, Pak Bahlil, sebelum ini bisa beri tanggapan dulu, baru kita ke, Pak Jerry. Mohon sabar, Pak Jerry.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak Wamen,

Mohon maaf, karena ini selain ketua, senior di aktivis, jadi kalau kita tidak menjawab dengan baik, dosa kita bisa berpangkat dua. Jadi saya mohon maaf, Pimpinan, ini pertanyaan Ketua ini, apakah memang sedang masih menguji idealisme adiknya juniornya atau tidak ini, bingung juga saya.

Ketua,

Foto tadi itu berada di lokasi Batang, kawasan industri. Itu adalah membangun pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara, yang 80% ekspor, investasinya adalah dari Korea, foto tadi. Yang kedua, seberapa besar komitmen pemerintah dalam mendorong PMA dan PMDN. Saya katakan Ketua, izin mohon maaf, Ketua, ada slidennya *enggak* tentang komposisi PMA, PMDN? Kalau untuk 2021, dari 901 triliun realisasi investasi kita, itu 49,5% itu PMDN dan PMA-nya adalah 50,5%, 50,4%. Perimbangan Jawa-luar Jawa pun 52 : 48. Kemudian negara mana-mana *aja sih* yang masuk pada 2021? Yang pertama Singapura. Saya coba *slide*-nya, Ketua, saya ingin menjelaskan sedikit, ini *inheren* dengan apa yang, Ketua, tadi tanyakan.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Boleh saya tanggap secepat?

Yang 5, 49% itu kira-kira dari 10 orang kaya di Indonesia, itu berapa persen yang menginvestasikan di PMDN kita?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Izinkan, Ketua, kalau boleh jawaban internal kalau yang itu.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Karena itu terkait dengan bagian yang kami

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):



Saya sebenarnya *enggak* perlu menja... *enggak*, *enggak* meminta nama-namanya, hanya meminta presentasinya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya juga belum hitung itu, Ketua, nanti saya hitung habis ini. Jangan sampai saya jawab, Ketua, nanti salah-salah nanti, bahaya, saya.

Yang kedua, Ketua, investasi asing yang masuk ke Indonesia yang paling banyak itu Singapura, Ketua. Tapi saya yakin, Ketua, ini bukan uang Singapura semua, ini sebagian uang orang Indonesia, Ketua. Yang mungkin salah satu diantaranya yang Ketua maksudkan itu. Dan sebagian lagi adalah Singapura jadikan sebagai *hub*. Jadi sebenarnya struktur investasi kita di Indonesia ini antara FDI dengan PMDN, itu sebenarnya lebih banyak PMDN kita, cuma karena pakai tangan negara lain. Dan kalau saya nanti duduk setengah kamar dengan Ketua, saya buka ini data, temannya Ketua berapa orang, mereka masuk di mana, saya buka ini data. Supaya jangan mereka datangi Ketua, pura-pura miskin terus, nanti saya kasih tahu.

Yang kedua Ketua, adalah Tiongkok itu di 2019 dan 2020 itu betul mereka nomor 2, tapi nomor 3 itu eh, di 2021, itu sudah Hongkong. Bahkan Amerika yang 4 tahun terakhir tidak masuk keempat besar, mereka sekarang *udah* masuk 4 besar. Jadi perimbangan investasi ini *udah*, *udah* paten, Ketua, *udah* paten.

Nah yang berikut adalah *project-project* strategis nasional. Salah satu sekarang kita dorong sekarang adalah ekosistem EV dan baterai mobil, Ketua. Yang terbesar sekarang di dunia yang membangun ekosistem dari hulu ke hilir. Itu Ketua, jadi investasi CATL sama LG, LG itu 142 triliun, CATL itu 70 triliun, itu semua kami wajibkan untuk berkolaborasi dengan BUMN. Bahkan untuk smelternya, itu 30% ya, Pak Imam? 30 apa 35? Kurang lebih 30% itu saham BUMN, *precursors cathode battery cell* itu minimal 25% itu BUMN. Jadi keterlibatan pengusaha nasional dalam mengerjakan *project-project* strategis nasional, itu kami dorong lewat 2, satu keberadaan BUMN, satu adalah swasta nasional. *Kenapa* ini kita lakukan Ketua? Kita tidak mau lagi pengalaman seperti dulu Freeport. Freeport kan saham kita cuma 10%, gaya-gaya lama sudah harus kita *rubah*, tapi memang negosiasinya, Ketua, harus negosiasi *Lillah Ta'ala*, *enggak* boleh negosiasi aneh-aneh. Jadi *enggak* ada kata-kata tambahan dalam bernegosiasi kalau kita mau ke depankan kala urusan negara. Itu, Ketua.

WAKIL KETUA (FAISOL RIZA, S.S./KETUA KOMISI VI DPR RI):

Saya ingatkan ini, Pak Bahlil, soal investasi baterai, karena baterai ini kan membutuhkan waktu 7 tahun sampai jadi *in-product*. Nah selama 7 tahun Pak Jokowi sekarang sudah mengeluarkan instruksi untuk penggunaan mobil



listrik di lingkungan pemerintah sampai 3 tahun ke depan. Nah kalau kita berangkatnya dari hulu baru sampai ke hilir itu butuh waktu 7 tahun, nah dalam 3 tahun kalau misalnya ekosistem apa, perdagangannya sudah terbentuk, maka pabrik atau baterai kita, itu mungkin sudah *enggak* bisa masuk ke dalam ekosistem pasar yang ada. Makanya saya mengusulkan, mungkin bisa dikaji oleh teman-teman di BKPM, juga bisa diikuti dari hilir, supaya baterai-baterai yang misalnya seperti sekarang ABC misalnya, diberikan kesempatan untuk apa, mulai masuk ke pasar dengan membuat baterainya untuk kendaraan bermotor misalnya lis... sepeda motor dulu, sebelum ke mobil. Karena kalau *enggak* dilindungi pasarnya, khawatir 7 tahun ini kita menghabiskan waktu, sementara pasarnya dikuasai oleh luar. Mungkin itu bisa dikaji.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ketua, izin,

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pimpinan, izin, Pimpinan, terkait itu juga.

Pak Menteri, saya apresiasi ini *udah* selesai ya urusan ini, Pak, ya LG dengan CATL ya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya bisa jelaskan biar lebih komprehensif?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya ini sekalian, biar nanti jelasinnya lebih enak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Enggak (...suara tidak jelas) mohon maaf, biar nanti... Pak Deddy bisa nanti setelahnya pada saat ini.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ketua,

Karena sesama mantan aktivis, saya setuju dengan, Ketua. Dari awal saya sudah memikirkan itu. Kalau kita *aja* dari hulu ke hilir, itu tunggu minimal 4—5 tahun. Maka apa yang terjadi, Ketua? Kami sudah membangun industri

hilirnya dulu. Jadi baterai selnya dulu kita bangun, dan sudah bisa berproduksi di 2023 akhir. Jadi mobil apa, baterai mobil kita di Karawang, yang investasinya 1 miliar lebih US Dollar, itu sudah bisa produksi di akhir 2023. *Gimana, Pak?* Iya di Karawang, di Karawang. Jadi *udah* inhiren dengan pikiran, Ketua. Sambil, jadi itu kan perlu tahapannya begini, nikel smelter untuk melahirkan bahan baku *precursors cathode, precursors cathode*, baru baterai sel. Nah ini kita potong, bangun dulu baterai selnya, *precursors cathode*-nya, sambil kita bangun industrinya, kita impor dulu, supaya apa? Pasar dalam negeri bisa kita jaga. Dan mobilnya sekarang dari Hyundai itu sudah berproduksi. Jadi baterai mobil apa, pabrik baterai mobil itulah pertama di Asia Tenggara dan mobil listrik kita yang sudah berproduksi juga pertama di Asia Tenggara. Jadi saya setuju sama Ketua, sambil sekarang CATL sama LG karena sudah mendekati pada *green energy*, CATL itu akan bangun di Kaltara, di dapilnya Pak Dedy. Nah sementara kalau LG itu smelternya itu dibangun di, di Maluku Utara, *precursors cathode battery cell*-nya itu akan membangun di Batang, itu kira-kira, Pak Ketua. Dan ini adalah kolaborasi BUMN, pengusaha nasional, dan investor asing. Karena Pak Wamen sudah mau berangkat, Ketua, mohon maaf saya lihat sudah gelisah, napasnya sudah naik turun.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin... izin Pimpinan saya mohon, saya mohon izin, Pak Bahlil, karena ini terkait dengan itu.

KETUA RAPAT:

Pak Dedy, tolong sebentar aja ya?

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Iya sebentar *aja*, ini karena terkait sekali.

Yang mau saya bilang begini, Pak, pertama soal pengesahan nasional. Kemarin itu kan saya tahu ada pengusaha nasional di situ yang sudah terkait dengan IUP-nya tapi kemudian kan memang diputus oleh Antam, itu bagaimana, ya? Apakah memang sudah sama sekali tidak bisa dilibatkan atau apa? itu yang pertama.

Yang kedua yang ingin saya tanyakan, tadi kan saya berharap supaya perusahaan-perusahaan mobil listrik yang dijual di Indonesia, tidak hanya Hyundai, kalau mau memasarkan produknya, ya *bikin* di sini, Pak. Jangan lagi ya kita ekspor ke sana baterainya datang ke kita sudah, sudah jadi mobil *gitu loh*. Ya nanti mereka bikin mobilnya di Thailand, mereka bikin di Malaysia, lalu baterainya pakai kita, bikin di sini. Saya kira itu juga harus di dorong, Pak, supaya semua ATPM itu yang produksi mobil listrik, dengan memakai barang produk kita, ya bikin *assembly*-nya di sini *gitu loh*, Pak. Saya kira itu, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Izin, Pak, kalau yang urusan Antam, IUP yang di Maluku Utara itu sudah dibagi, CATL sama LG. Kita ini, Pak, kadang-kadang komitmen investasi terlalu banyak tapi banyak mutarnya juga. *Ngarangnya* terlalu banyak, kelakuan kita dulu waktu masih di HIPMI, harapan itu bisa dikasih. Sama dengan dulu kita pacaran pun harapan yang kita kasih, padahal kita *enggak* punya apa-apa. Nah cara-cara begini kita butuh *real-real* aja, Pak.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ini kan konkrit *aja*, ya saya sebut saja nama kan ya? Karena saya juga dimintain tolong *nih* orang tua, karena orang tua *aja*, saya *enggak* ada kepentingan, waktu itu Pak Setiawan Djodi.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Tahu, tahu.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Ya kan soal-soal itu. Ya jadi karena orang tua *aja* kita ladeni dan saya udah bawa ketemu Antam. Nah lalu berapa *sih* porsi Antam dari kerja sama itu, Pak? Sahamnya berapa dari masing-masing itu?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Kalau saham untuk tambangnya, tetap Antam mayoritas, opor... di smelternya 30%, *precursors cathode battery cell*, minimal 25%, sa... *gimana?* oh *enggak*, harus pakai *equity*, *deng*, *enggak*, itu bisnis tambak zaman *baheula* itu namanya, itu kalau tak kalau *enggak*, itu IUP mereka beli 49% dinilai oleh KJPP. Iya *dong*, berapa yang dilakukan KJPP, itu menjadi milik Antam, bahwa Antam mau jadikan sebagai *equity*, *monggo*, tapi tidak ada lagi model-model bisnis lama-lama yang mau tekan-tekan orang, *enggak* bisa lagi, negara ini harus maju.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Bukan, maksud saya kalau itu kemudian dijual, diakuisisi oleh sana, oleh investor, itu lalu kan itu yang kemudian menjadi *equity* mereka untuk kerja samanya

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Yes.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):



Kan begitu maksudnya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya itu aksi korporasi internal mereka, karena kita pemerintah *enggak* boleh masuk pada wilayah yang menjadi domain bisnis mereka.

Yang kedua menyangkut mobil listrik, Pak, Foxconn masuk bangun lis... apa, mobil listrik di sini. Bahkan CATL juga kita minta mereka untuk membangun mobil listrik di sini. Jadi Pak Deddy, saya pikir cukup demikian, karena kasihan sahabat saya, sesama anak timur ini *enggak* boleh saling menyandera dalam forum ini.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Sebentar lagi habis rapat *aja*, Pak, rapat ngobrol lagi *nih*.

KETUA RAPAT:

Baik silakan, Pak Jerry.

WAMENDAG (DR. JERRY SAMBUAGA):

Makasih, Pimpinan.

Pak Menteri Investasi, *makasih* juga tadi atas waktunya.

Dan saya mau menjawab mungkin beberapa sebelum izin, Pak, meninggalkan tempat karena harus berangkat ke Bali untuk G20. Pertama tadi saya catat ada beberapa, mungkin saya sambil menggabungkan sisanya kami berikan jawaban tertulis. Izin, Pimpinan, dan Anggota Dewan. Pertama tadi saya catat dari Pak Muslim dan juga Pak Deddy, dan Ibu Sondang saya mau jawab dulu untuk yang Pak Deddy.

Terkait dengan perdagangan lalu lintas, lintas batas di Kalimantan ya, di Krayan ya, Pak Deddy, ya? Tadi kami juga dapat info terakhir yang *latest update* kami bahwa itu sedang dalam perundingan bersama dengan lintas K/L dan juga *stakeholder*, salah satunya dengan Kementerian Luar Negeri dan dari kami dari PPPI (Perundingan Perdagangan Perjanjian Internasional) dari Kemendag dan juga tentunya dikordinasikan dengan BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Dan itu rencananya sudah mencapai titik terang ya dan ada negosiasi yang sedang dilakukan untuk membahas besaran barang dan juga berapa nilai yang bisa dilakukan di darat, Pak Deddy. Dan mungkin mudah-mudahan itu tadi saya dapat info terakhir, itu akan bisa disepakati, Insya Allah mudah-mudahan itu pada saat nanti kita melakukan *trade expo*, Pak Deddy, itu mungkin bulan-bulan depan ini. Kalau memang itu sudah berhasil nanti kita akan berikan informasi *ter-update*, karena sedang dalam

proses negosiasi untuk membahas bilateral dengan Malaysia. Mungkin itu, Pak Deddy, sementara.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Izin, Pak Wamen.

Yang akan disepakati itu volume barang, apakah juga termasuk pelaku perdagangan bebas? Karena masyarakat kan meminta supaya mereka kembali ke seperti sebelum Covid, di mana bisa dilakukan oleh perorangan tapi kan Malaysia minta ada entitas yang kemudian menjadi *bridging* untuk melakukan transaksi *gitu*, ini mana yang akan disepakati?

WAMENDAG (DR. JERRY SAMBUAGA):

Baik, nah itu saya harus pastikan dulu datanya, supaya nanti saya dapat memberikan informasi yang akurat, tapi segera kami catat, Pak Deddy, terkait yang, Pak Deddy, tanyakan terkait, dengan volume atau juga pelaku, sehingga nanti kami bisa memberikan jawaban yang apa, yang seakurat mungkin. Mungkin itu untuk, Pak Deddy, jawaban yang bisa saya sampaikan.

Lalu untuk, Pak Muslim, Bang Muslim, izin Bang. Terima kasih tadi pertanyaannya, ini mungkin juga agak *related* dengan yang, Bu Sondang, tanyakan terkait dengan antisipasi dan juga *update* terkait dengan harga-harga dan tentunya apa yang langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan. Yang pertama, tentu kami berkordinasi dengan lintas K/L, Pak Muslim, ya, dan tentu ini menjadi salah satu acuan ya dan juga salah satu tindakan konkrit di lapangan ya dengan Bapanas, dengan Satgas Pangan, dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota hampir setiap hari, Pak Muslim, kami dengan Pak Menteri dengan jajaran Eselon I, II, III, dan seterusnya, kita selalu turun ke lapangan mengecek pasar, mengecek pasar tradisional, pasar modern, pasar becek, seluruh pasar, *basically*, yang kita pastikan terkait dengan *availability* dan juga harga. Sedikit laporan juga kepada, Pak Muslim, dan Bapak/Ibu Pimpinan, dan juga Bapak/Ibu Anggota, bahwa harga-harga sembako dan juga harga bahan pokok, beberapa sudah mengalami penurunan. Sebagai contoh untuk harga telur itu per 7 September kemarin, Pak Muslim, itu secara nasional turun 1,27% dari 31.600 per kilo sekarang menjadi 31.200. Di DKI sendiri itu turunnya 5%, kemarin itu data terakhir kami terima dari 31.400 sekarang menjadi Rp28.000,00. Dan tentu ini juga barang-barang dan juga bahan pokok lainnya juga mengalami penurunan. Seperti minyak goreng bisa dicek, hampir setiap hari kami pastikan, itu dari mulai minyak curah sampai minyak kemasan, itu harganya juga sudah di bawah HET bahkan, yang untuk minyak curah. Berapa kali terakhir saya kemarin ke daerah di Jawa dan juga di Sumatera, itu sudah di bawah bahkan di bawah 12.000 per liter, sehingga itu menunjukkan memang beberapa harga untuk komoditas bahan pokok mengalami penurunan dan stabil dan ketersediaannya juga sangat cukup, Pak, Pak Muslim.

Lalu saya juga ingin memberikan beberapa tambahan ya, terkait dengan efisiensi logistik ya. Ini juga tadi yang ditanyakan soal BBM naik, apakah itu juga akan memberikan pengaruh. Saya pikir dampak pasti ada, tetapi dari sisi optimalisasi kita juga banyak efisiensi distribusi, transportasi angkutan, dan juga tentunya di lintas, lintas transportasi mulai dari tol laut yang ada 29 proyek tol laut, yang memudahkan juga untuk distribusi barang dan jasa. Lalu juga beberapa efisiensi logistik ya, yang tentunya kita manfaatkan dan optimalisasi dari sisi transportasi. Dan untuk punya kita, juga, juga salah satu cara dari Kementerian Perdagangan untuk memastikan sekali lagi, distribusi itu sampai ke Indonesia bagian timur ya. Beberapa kali Pak Menteri juga sudah sampaikan dalam beberapa kesempatan, beberapa rapat, dan juga mengecek langsung ya sampai ke Papua, sampai ke Maluku, Sulawesi, ya sama tempatnya Pak Bahlil juga, tempat-tempat saya juga, kita pastikan

MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Terima kasih Pak Wamen.

WAMENDAG (DR. JERRY SAMBUAGA):

Siap, Pak Menteri.

Ini kita pastikan supaya memang distribusinya itu lancar dan tentunya harganya itu kalau yang untuk minyak kita, sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan. Dan itu perkembangannya bagus, positif, nanti mungkin bisa dicek, dan kami juga komit untuk me, melibatkan juga teman-teman, Bapak/Ibu yang terhormat Anggota Dewan Komisi VI, untuk sama-sama juga nanti kita bisa mengecek, seperti yang pernah kami lakukan waktu itu di Bogor ya kalau tidak salah, bersama dengan Pimpinan.

Lalu untuk yang berikutnya yang terakhir, saya ingin menambahkan terkait dengan selain langkah-langkah antisipatif, ya kami juga kemarin baru saja juga kami melakukan Raker, RDP dengan Bappebti dengan Pimpinan, ada Bapak-Bapak, Ibu yang juga ikut kemarin, bahwa kita juga komit untuk ini mungkin di luar tema sedikit, tapi saya pastikan terkait dengan harga-harga komoditas, lalu juga komoditas perdagangan, komoditas berjangka, itu kami juga memiliki komitmen untuk memastikan proteksi terhadap konsumen. Karena memang kemarin yang dibahas ya, Pak Harris, dan juga beberapa kawan-kawan, terkait dengan konsen dari Pemerintah khususnya dari Bappebti pada saat itu, untuk bisa memberikan proteksi yang mempuni dan ya dan itu kami komit. Dan sesuai dengan hasil kesimpulan rapat kemarin juga akan kami *follow-up* secara detail langkah-langkah spesifiknya dan juga nanti jawaban tertulis juga akan kami sertakan sebagai bentuk respon dari Kementerian Perdagangan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan.



Mudah-mudahan ini bisa menjawab, selengkapnya akan kami lengkapi dengan data-data, juga tentunya harga-harga komoditas terbaru yang mudah-mudahan akan kami lampirkan dalam waktu dekat dan setelah dari sini kami izin untuk G20, Pimpinan, karena kebetulan Kementerian Perdagangan menjadi *host* untuk G20, Pak Menteri sendiri sudah ada di Bali, mudah-mudahan acaranya sukses. Pak Menteri Investasi juga akan ke Bali ya, Pak Bahlil, dan ini menjadi salah satu ajang juga Presidensi G20 kita ingin menunjukkan kita bisa memberikan posisi dan juga banyak keberpihakan suara-suara kita, Indonesia, sebagai negara yang kuat dan berdaulat dalam forum Presidensi G20.

Makasih, Pimpinan.

F-PDIP (Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, M.A.):

Sedikit, Pimpinan, nanti dijawab tertulis *aja* catatan *aja*, 30 detik.

Yang pertama, Pak, kami berharap karena kan sekarang memang harga komoditas bisa turun karena apa, *demand* kan juga lagi rendah, tapi kan kita memasuki musim penghujan dan nanti akhir tahun. Kami berharap ada mitigasi yang jelas, sehingga nanti kita tidak tiba-tiba kaget lagi semua naik kan *gitu*, ini mohon diberikan kepada kita.

Yang kedua soal minyak goreng merah, kita mohon penjelasan soal minyak goreng merah itu, karena kami dengar dari rakortas bahwa itu sepakati ada tiga tempat uji coba di Sumatera Utara, dan saya *udah* bilang sama Pak Menteri Koperasi, kalau itu benar itu jadi, saya minta dapil saya juga, Pak, ya. Karena di sana tidak ada banyak kebun rakyat yang akhirnya sawitnya dibeli murah karena tidak, apa namanya, PKS sering menolak supaya harganya jatuh. Saya kira itu.

Makasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Nah sebelum Pak Jerry berangkat *nih*, harus mengamini dulu draft kesimpulan kita, coba ditayangkan.

Draft kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI dan Wakil Menteri Perdagangan RI tentang penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran, Rabu 21 September 2022.

1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI,



Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM RI tahun anggaran 2023 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 sebesar Rp1.094.222.046.000,00 (*Satu triliun Sembilan puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta empat puluh enam ribu rupiah*) dengan alokasi sebagai berikut:

- A. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp392.644.568.000,00, (*Tiga ratus Sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah*), dan
- B. Program Penanaman Modal sebesar Rp701.577.478.000,00 (*Tujuh ratus satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*)

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

Untuk angkanya sudah benar ya?

(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)

Baik.

2. Kementerian Perdagangan RI, Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Perdagangan tahun anggaran 2023 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/16721/AG.05.02.09/2022 tanggal 20 September 2022 sebesar Rp2.272.241.523.000,00 (*Dua triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah*) dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.349.573.077,00, (*Satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah*).
 - b. Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp495.991.000.000,00, (*Empat ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).
 - c. Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp427.667.455.000,00. (*Empat ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*)

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran RI sebagai bahan akhir penetapan.

Sudah cocok semua ya?

(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)



Baik, yang normatif,

3. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/BKPM RI dan Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT: SETUJU)**

Baik terima kasih saya rasa sudah cukup, nanti kita berjumpa pada raker-raker berikutnya. Saya akhiri rapat ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.33 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001

